



KH. Muhyiddin Abdusshomad

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember dan Penulis Buku Fiqih Tradisional. Beliau juga Redaktur Ahli Jurnal Tashwirul Afkar.

Rumusan Ideologi NU Belum Ditransformasi dengan Baik

Fenomena mutakhir perjalanan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dihadapkan pada beragam tantangan. Tidak saja tantangan bagaimana menjembatani keberjarakan antara landasan ideologisnya di satu pihak dengan realitas yang demi-

kian pesatnya berkembang di pihak lain. Melainkan yang lebih penting adalah desakan beragam ideologi yang perlahan tapi pasti mengikis meruntuhkan basis ideologis komunitas NU. Contoh yang paling nyata adalah upaya sebagian kalangan untuk melahirkan kembali

perdebatan lama menyangkut persoalan *furu'iyah* semisal Fatwa (atas nama) Ulama Jombang yang jelas-jelas hendak menghapus tradisi yang berkembang di kalangan nahdliyin.

Perkembangan terbaru adalah gerakan yang cukup massif dari gerakan salafi. Gerakan salafi yang dimaksud adalah pengikut paham Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, dan Muhammad ibn Abdul Wahab. Salah satu 'sekte' salafi yang paling gencar adalah Salafi produk Yaman yang disebarakan melalui murid-murid Syaikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i dari Dammaz. Gerakan salafi jenis ini tidak saja berkembang di kota-kota besar, melainkan juga menyebar ke daerah-daerah melalui berbagai medium. Salah satu medium yang digunakan adalah pendirian pesantren dan masjid.

Pendirian pesantren dan masjid ini didukung oleh dana cukup besar. Dalam kasus Gladak Pakem Jember, misalnya, mereka mendirikan sebuah masjid di tengah-tengah kota dengan kapasitas 5000 orang, sebuah masjid yang setara dengan masjid yang dibangun pemerintah bersama masyarakat.

Selain itu, mereka juga memiliki media cetak yang didistribusikan secara intens. Intensitas ini ditopang dengan militansi kader yang dimilikinya. Kader-kader militan itu tidak saja dalam ekstensifikasi fahamnya, tetapi juga kondisi objektif kader-kader, yang konon berasal dari para mantan lasykar jihad. Melalui para kadernya, mereka menyebarkan brosur dan bulletin, yang disebar ke seluruh masjid di Jember dan sekitarnya.

Kehadiran kelompok-kelompok ini tentu saja menimbulkan ketegangan di kalangan warga nahdliyin. Setidaknya ini karena beberapa hal. *Pertama*, mereka mengampanyekan arabisasi. Jadi yang penting berbahasa Arab, bersumber dari Arab, sehingga budaya yang bukan Arab seolah-olah seolah-olah dianggap telah keluar dari Islam. Sebut saja misalnya keharusan berjenggot dan keharusan menyingsingkan celana. Sementara di kalangan salafi, persoalan semacam itu merupakan hal paling pokok. Sedangkan di kalangan nahdliyin hanyalah bagian yang tidak dianggap pokok. Karena hal itu hanyalah persoalan *furu'iyah* dan disikapi secara beragam oleh para ulama, dari sunnah hingga penyikapan bahwa hal itu hanyalah bagian dari budaya saja. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Yas'alûnaka fi ad-Dîni wa al-Hayah*, juz VI (hlm. 370).

Belum lagi di kalangan nahdliyin memiliki tradisi dan kultur tersendiri, semisal kebiasaan tahlil, ziarah kubur, dan saling bersedekah satu sama yang lain, satu hal yang ditolak oleh kalangan salafi. Jika kebiasaan yang telah mendarah daging ini ditolak, tentu saja akan melahirkan konflik. Pengalaman di Jember, karena diserang budayanya, masyarakat sempat berkumpul dalam sebuah pengajian, bahkan hampir terjadi bentrok fisik. Kehadiran kiai-kiai sepuh di Jember sangat berarti dalam mengendalikan ketegangan itu. Jika kasus semacam ini terjadi di mana-mana, tentu saja akan membahayakan keutuhan umat.

NU Melupakan Aspek Sosial Kemasyarakatan

Terombang-ambingnya keyakinan umat di lingkungan nahdliyin ini terjadi karena konsentrasi NU tidak lagi terfokus pada pengayoman masyarakatnya. Menurut saya, para sesepuh NU, dalam hal ini PBNU, paling bertanggung jawab dalam mengamankan ideologi NU. Salah satunya melalui pembentukan tim untuk kaderisasi yang lebih intens. Selama ini, kesibukan di PBNU justru terkait dengan sesuatu yang tidak terlalu penting (bukan tidak penting), semisal pelatihan ESQ. Gagasan PBNU, sejak zaman KH. Abdurrahman Wahid sampai saat ini belum terealisasi untuk merumuskan Aswaja ala NU.

Saya kira, para elit NU, mulai dari MWC, Cabang, Pengurus Wilayah, hingga Pengurus Besar, sudah memiliki kapasitas yang cukup memadai. Hanya saja perhatian pada persoalan kaderisasi dan pengayoman umat kurang begitu dipedulikan. Selama ini, elit NU lebih disibukkan pada urusan politik. Kalau kita cermati berita-berita penting, baik di media elektronik maupun cetak, bagaimana perjuangan kiai NU dalam memperjuangkan ideologi NU tidak muncul. Malah yang banyak digembar-gemborkan adalah berita-berita bahwa kiai NU mendukung si A, menolak si B, dan lain-lain. Sementara apa dan bagaimana keyakinan NU belum ditransformasi dengan baik oleh para elit NU.

Di tengah intensitas kelompok ideologis lain, sudah seharusnya NU melalui seluruh perangkatnya lebih memperhatikan pada aspek sosial keagamaan dan

kemasyarakatan warganya. Kita tidak bisa menyalahkan siapa saja, termasuk para sesepuh NU. Saya tidak tahu, apakah para sesepuh NU tidak punya waktu atau ada sesuatu yang lain, sehingga mereka tidak bisa menuangkan pemikiran ideologisnya dalam bentuk tulisan. Padahal KH. Hasyim Asy'ari menulis puluhan buku. Sementara generasi penerusnya, walaupun ada, hanya bisa dihitung dengan jari. Di pihak yang lain, generasi muda NU tidak punya banyak waktu untuk belajar apa dan bagaimana NU. Belum lagi, akses anak-anak muda NU untuk bertemu dengan tokoh sentralnya demikian sulit, kecuali dalam acara-acara formal. Walaupun bertemu di forum formal, yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ideologi, tetapi lebih pada masalah organisasi, manajemen, dan relasinya dengan pihak luar. Tentu saja, persoalan organisasi, manajemen, dan relasi dengan pihak luar merupakan satu yang sangat penting, namun bukan berarti aspek ideologi yang menjadi landasan etis dan praktis warga nahdliyin dilupakan.

Toleransi Keablasan

Militansi ideologis juga terganggu akibat apa yang disebut "toleransi yang keablasan." Perlu ditegaskan bahwa dalam tradisi pesantren, *tasâmuh* merupakan nilai yang sudah tertanam begitu kuat. Dalam lektur pesantren, perbedaan-perbedaan paham sangat biasa terjadi, dan di antara beragam pendapat yang berbeda-beda itu tidak saling menyalahkan. Pernyataan "*fihî tsalâtsatu aqwâlin* (dalam

masalah ini ada tiga pendapat) misalnya sangat lumrah terjadi dalam lektur-lektur pesantren. Namun demikian, sikap tasamuh yang dipegangi sebagian kalangan NU tampak berlebihan, misalnya membela orang yang sebenarnya berseberangan dengan pandangan ideologi dan teologi kita.

Sebut saja misalnya Ahmadiyah dan Syiah. Secara ideologis, NU dan Ahmadiyah serta Syiah itu berhadapan. Semestinya kita sekadar menghargai keyakinan Ahmadiyah dan Syiah itu sebagai sebuah realitas anak bangsa yang multikultural. Tetapi bukan pada tingkat membela dan membenarkan ajarannya. Sehingga di beberapa kota, banyak muncul kasus. Misalnya, para pemimpin Syi'ah dan Ahmadiyah adalah putra-putra NU, dan ketika memimpin ormas di luar NU seringkali yang menjadi obyek garapannya adalah warga NU. Seperti kasus di Jambisari Bondowoso (23/12/2006), terjadi amuk massa akibat pengajian Syiah yang menyinggung perasaan dan menyerang ideologi masyarakat tradisional. Selama ini yang terjadi di NU, para tokoh-tokoh NU itu membelanya sedemikian rupa, sehingga terkesan bahwa yang dibela itu benar. Padahal kita tidak hendak membenarkan ajarannya. Yang kita lakukan sekadar menghargai keragaman anak bangsa dalam relasi kemanusiaan.

Dalam konteks ini, yang perlu dilakukan adalah mengkaji pemahaman Aswaja menurut faham para pendiri NU dan kiai-kiai NU dari dulu hingga sekarang. Dan tidak kalah pentingnya, perlu ada batasan tentang pemikiran liberal yang tidak diperkenankan bagi warga NU. Karena ada kesan bahwa ada seorang yang sangat anti liberal dalam berbagai pernyataannya, tetapi orang lain menganggap si pemberi pernyataan tersebut justru sebagai tokoh liberal. Ini karena belum jelas, sejauh mana takaran liberal itu? Jika mereka masih mengacu pada para ulama yang muktabar, semisal Al-Muzanni yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat laki-laki (*Subulu as-Salam*, juz 2, hlm 28), Ibn Hajar al-Asqalani tentang pelarangan poligami apabila menimbulkan mudlarat (*Fathu al-Bari*, juz 9, hlm. 240-241), dan lain sebagainya. Apakah mereka masih akan dianggap berfaham liberal yang terlarang?

Oleh karena itu, pemahaman ideologi NU terlebih dahulu dirumuskan dan kemudian disosialisasikan ke PWNU, PCNU, dan Ranting. Pada tahap selanjutnya, kita menganjurkan pada warga nahdliyin khususnya, dan umat pada umumnya, untuk menghargai perbedaan. Jadi sudah sepantasnya kita saling menghargai, walaupun tidak harus saling membenarkan. *Wallahu A'lam* ❖